



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDALTAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	3
C. Isu-isu Strategis	15
D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	16
E. Sistematika Penulisan	20
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025	21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	24
B. Strategi dan Arah Kebijakan	30
C. Perjanjian Kinerja tahun 2025	32
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	37
B. Efisiensi Anggaran	44
C. Inovasi.....	50
D. Penghargaan.....	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Rekomendasi.....	52

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

RKT / Lain2 yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Peta Proses Bisnis.....	4
Tabel 1.2 : Sumber Daya Aparatur.....	16
Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana Kecamatan Kaliwungu.....	17
Tabel 1.4 : Tindak lanjut LHE Tahun 2025.....	21
Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	26
Tabel 2.2 : Target Indikator Kinerja Tahun 2026.....	30
Tabel 2.3 : Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kaliwungu.....	30
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja	32
Tabel 2.5 : Program , Kegiatan , Indikator Kinerja dan Target Tahun 2026.....	33
Tabel 3.1 : Indikator Kinerja Sasaran 1.....	37
Tabel 3.2 : Indikator Kinerja Sasaran 2.....	39
Tabel 3.3 : Realisasi Capaian kinerja.....	40
Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.....	40
Tabel 3.5 : Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Menengah.....	41
Tabel 3.6 : Analisis Keberhasilan/Kegagalan.....	41
Tabel 3.7 : Pencapaian Anggaran.....	42
Tabel 3.8 : Pencapaian Keuangan dan Anggaran.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2 : Struktur Dinas / Badan	14
Gambar 1.1 : Cascading Kinerja	27

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan Kaliwungu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Camat Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor : 100.1.6/ 34 //2025 tanggal 23 Desember 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Kaliwungu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Strategis 2026 – 2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 yang telah ditetapkan.

Kendal, Januari 2026

PIL. CAMAT KALIWUNGU



PRATIKTIO JOKO WIJAYANTO, S.H.

Pembina

NIP. 197211162003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berwenang untuk mengatur dan mengurus asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Menurut Undang-Undang No.22 tahun 1999 jo No.32/2004 status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , secara eksplisit memberi otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legistik diatur dengan Peraturan Pemerintahan.Berdasarkan PP. No 19 tahun 2008 bahwa Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan nama lain adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya

seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal, bahwa Camat bertugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan , Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan peraturan per undang-undangan,Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menuju good governance itulah, maka jajaran Pemerintah Kecamatan Kaliwungu berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun landasan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan landasan tersebut, kami mencoba membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan tentang tugas pokok dan fungsi Camat serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepada kami berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang dirumuskan sebelumnya.

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

a. Mandat Kinerja

Kecamatan Kaliwungu merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Pegandon, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Brangsong dan sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang dan Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Secara geografis Kecamatan Kaliwungu terletak di 6°32 – 7°24 Lintang Selatan dan 109°41 – 110°18 Bujur Timur. Wilayahnya terdiri dari dataran rendah dan perbukitan, dengan luas wilayah mencapai 33,88 km² , terdiri dari:

1.	Tanah Sawah	:	12,76 km ²	(37,68 %)
2.	Tanah Pekarangan	:	4,28 km ²	(12,63 %)
3.	Tanah Tegalan	:	4,69 km ²	(13,84 %)
4.	Tambak dan kolam	:	- km ²	(----- %)
5.	Hutan	:	9,87 km ²	(29,12 %)
6.	Perkebunan	:	- km ²	(----- %)
7.	Lain-lain	:	2,28 km ²	(6,72 %)

Batas wilayahnya yaitu sebelah timur berbatasan dengan Semarang, sebelah barat Kecamatan Brangsong, sebelah selatan Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Brangsong, dan sebelah utara berbatasan dengan Semarang. Sedangkan jarak ibu kota kecamatan ke Ibu kota kabupaten ± 7 kilometer.

Secara administratif wilayahnya dibagi dalam 9 desa yaitu:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1.Kumpulrejo | 8.Mororejo |
| 2.Karang Tengah | 9. Wonorejo |
| 3.Sarirejo | |
| 4.Krajan | |
| 5.Kutoharjo | |
| 6.Sumberejo | |
| 7.Nolokerto | |

Jumlah penduduk Kecamatan Kaliwungu tahun 2022, sebanyak 66,897 jiwa, terdiri dari laki-laki 33,498 (50,07 %) dan perempuan

33,399 (49,93 %)(Sumber dari BPS : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2023), dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 22.650 KK (Sumber : Data Agregat Kependudukan tahun 2023 Dispendukcapil Kab Kendal)

b. Peta Proses Bisnis

Tabel 1.1
Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	01.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	01.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Permohonan berkas pengajuan IMB untuk luas maksimum 100 M2
			Penelitian kelengkapan berkas, verifikasi pengajuan ijin, agenda permohonan ijin dan pemberitahuan pemeriksaan lokasi
			Pemeriksaan Lokasi Perijinan
			Penyusunan BA pemeriksaan lokasi dan pembuatan SK Perijinan
			Penandatanganan SK Perijinan
			Penyerahan SK Perijinan
02. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	02.1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	02.1.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Melaksanakan musrenbangdes
			Melaksanakan monitoring musrenbangdes
			Merekap hasil musrenbangdes sebagai bahan tingkat kecamatan
			Mendata program kegiatan sektoral yang diusulkan lewat lintas sektoral

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Menginput hasil musrenbangdes dan program kegiatan sektoral lewat aplikasi SIPD
			Meneliti rekapitulasi hasil musrenbangdes untuk diajukan kepada camat
			Menandatangani rekapitulasi hasil musrenbangdes dan pendataan program sektoral sebagai bahan musrenbangcam
			Mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan musrenbangcam
			Pelaksanaan musrenbangcam
			Merekap hasil penentuan skala prioritas perencanaan pembangunan kecamatan
			Meneliti hasil rekapitulasi skala prioritas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
			Menandatangani rekapitulasi sebagai bahan musrenbangkab
			Mengarsip dan mengirimkan hasil musrenbangcam ke Bapertlitbang
		02.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Menyiapkan administrasi persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kegiatan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Membuat laporan kegiatan untuk ditandatangani oleh atasan
			Menandatangani hasil laporan kegiatan
			Melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Instansi terkait
03. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	03.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	03.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Menyusun jadwal kegiatan monitoring pengawasan wilayah
			Mempersiapkan administrasi Rapat Koordinasi persiapan kegiatan monitoring bersama forkompincam
			Pelaksanaan Rakor dan pembagian team monitoring
			Pelaksanaan monitoring wilayah
			Pelaporan hasil monitoring wilayah
	03.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	03.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Membuat konsep surat kegiatan pengamanan wilayah/kunjungan kerja pejabat sesuai perintah atasan (Surat Perintah Tugas)
			Mengetik Surat Perintah Tugas dan menyampaikan konsep surat kepada Kasi
			Konsep SP dinaikkan kepada Sekcam dan di paraf untuk ditandatangani Camat
			SP disampaikan kepada Satpol PP dan memberikan briefing

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			pengamanan wilayah/kunjungan pejabat
			Pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah/kunjungan pejabat bersama team
04. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	04.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	04.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Membuat materi kegiatan pembinaan administrasi desa
			Mempersiapkan jadwal pembinaan administrasi desa
			Menaikkan konsep undangan/jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Penandatanganan jadwal kegiatan pembinaan (camat)
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan
			Membuat Laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
		04.1.2 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Membuat jadwal kegiatan pembinaan penyusunan RAPBDes dan perdes
			Mempersiapkan jadwal dan undangan pembinaan
			Menaikkan konsep undangan/jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Undangan dinaikkan ke Camat untuk ditandatangani
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan RAPBDes dan Perdes
			Membuat Laporan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait (Dispermasdes)
		04.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Membuat undangan Rakor Pengisian Perangkat Desa dan penyampaian jadwal waktu pengisian Perangkat Desa kepada Camat
			Rakor penentuan mekanisme pengisian perangkat desa dan pembentukan P5D
			Pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa sesuai jadwal
			Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tahapan kegiatan oleh P5D
			Rakor persiapan pelaksanaan ujian penyaringan Balon Perangkat Desa
			Pengambilan soal ujian dan kunci jawaban di Kabupaten
			Pelaksanaan ujian penyaringan
			Monitoring pelaksanaan kegiatan dan koreksi hasil ujian di kecamatan
			Pelaksanaan pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan perangkat desa
			Monitoring pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
			Melaporkan hasil pemungutan dan

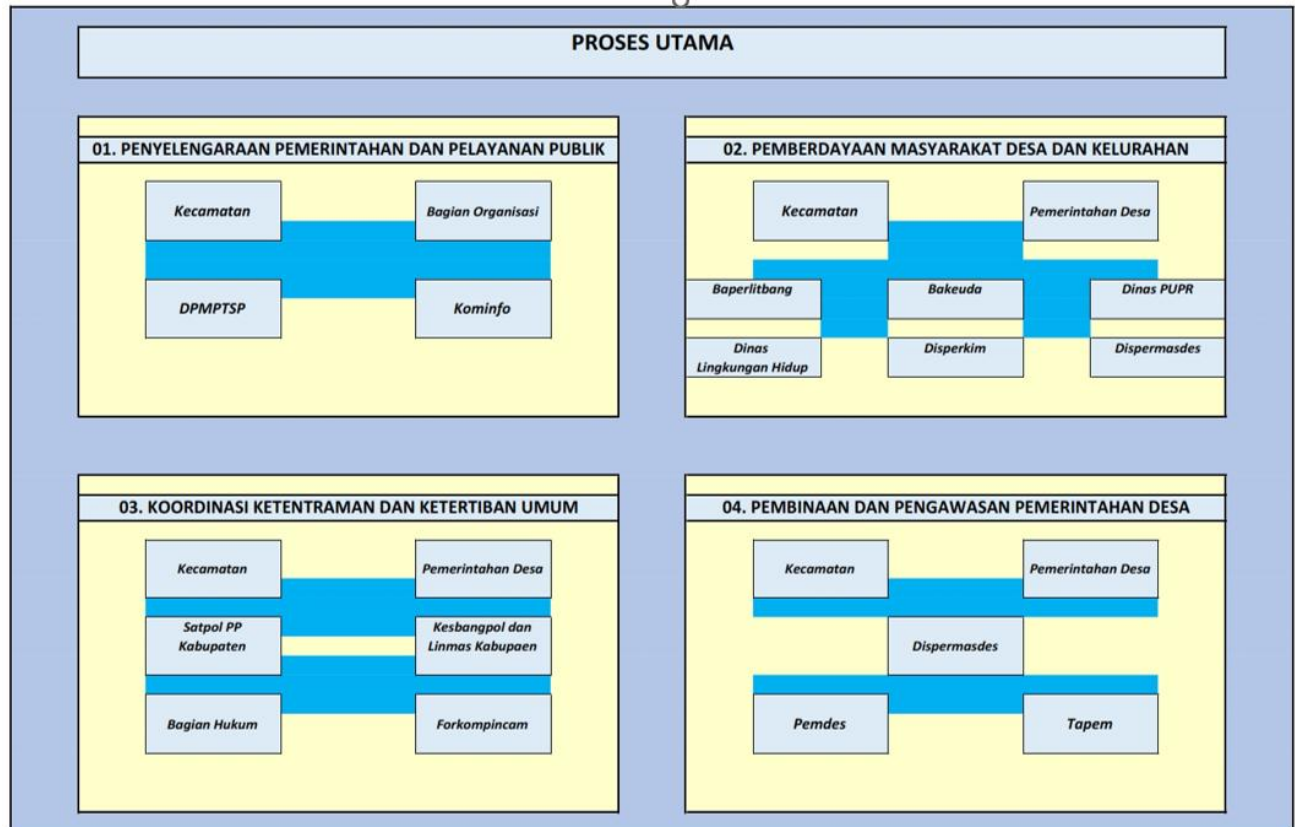
Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			penghitungan suara kepada Kades dan BPD sebagai dasar proses pengangkatan perangkat desa
			Pembuatan SK Calon terpilih atas persetujuan BPD, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Perangkat Desa terpilih
			Melaporkan hasil Pemilihan Perangkat Desa ke Kabupaten (dinas terkait)
05. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	05.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	05.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Menerima plafon anggaran dan pedoman penyusunan RKA/DPA
			Klarifikasi Plafond Anggaran dengan Renja OPD
			Penyusunan RKA/DPA
			Verifikasi dan Rekapitulasi RKA/DPA Kasi dan Kasubag
			Validasi RKA/DPA
			Asistensi RKA/DPA
			Menandatangani RKA/DPA
		05.1.2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Menerima surat perintah dan Pedoman untuk menyusun LAKIP
			Mengumpulkan data pendukung LAKIP
			Penyusunan LAKIP
			Melakukan Koreksi Dokumen LAKIP
			Menindaklanjuti Koreksi Dokumen LAKIP
			Memaraf Dokumen LAKIP
			Menandatangani LAKIP
	05.2 Administrasi	05.2.1 Penyediaan	Menyiapkan SPP-SPM

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
	keuangan perangkat daerah	gaji dan tunjangan ASN	dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Menandatangani SPP- SPM dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai
			Menerima SP2D dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai
			Menandatangani Daftar Penerimaan Gaji Pegawai
			Mentransfer Gaji ke dalam rekening masing-masing pegawai
		05.2.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Membuat Pengajuan Pencairan GU
			Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penerima honor
			Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerima honor
			Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran honor
			Pencairan honor
			Menandatangani pencairan honor
			Menyerahkan/mencairkan honor kepada penerima honor
	05.3 Administrasi kepegawaian perangkat daerah	05.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Membuat daftar penerima pakaian dinas
			Belanja pakaian dinas
			Pembagian pakaian dinas dan tanda tangan penerimaan
			Membuat laporan pertanggungjawaban belanja pakaian dinas
			Menandatangani SPJ
	05.4 Administrasi umum perangkat daerah	05.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Membuat rekap daftar barang yang akan dibeli
		05.4.2 Penyediaan peralatan dan	Survey harga barang minimal sesuai dengan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
		perlengkapan kantor	SSH
		05.4.3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Membuat surat pesanan belanja barang
		05.4.4 Penyediaan bahan logistik	Pembayaran belanja barang
		05.4.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Menghimpun nota pembelian dan membuat laporan pertanggungjawaban
		05.4.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Laporan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran beserta kelengkapan administrasinya
			Mengirim SPJ ke Bakeuda
		05.4.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Menindaklanjuti surat perintah rapat koordinasi
			Melaksanakan rapat koordinasi
			Melaporkan hasil rapat koordinasi kepada atasan
			Menyusun laporan hasil rapat koordinasi Dan mengirim SPJ
	05.5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	05.5.1 Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Panitia/Pejabat Pengadaan menyerahkan BOQ (Bill Of Quantity) definitive kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang
		05.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Panitia Pemeriksa/Penerima Barang memeriksa kelengkapan dokumen
			Memeriksa BOQ awal dengan BOQ dalam kontrak jika berbeda
			Dokumen yang sudah valid diserahkan ke operator untuk diinput ke sistem informasi perlengkapan
			Operator menginput data penyedia barang dan jasa ke dalam sistem informasi perlengkapan dan mencetak label barang pemeriksaan
			Panitia penerima dan pemeriksaan memeriksa kesesuaian kemasan, kuantitas, spesifikasi, berfungsi dgn baik dan

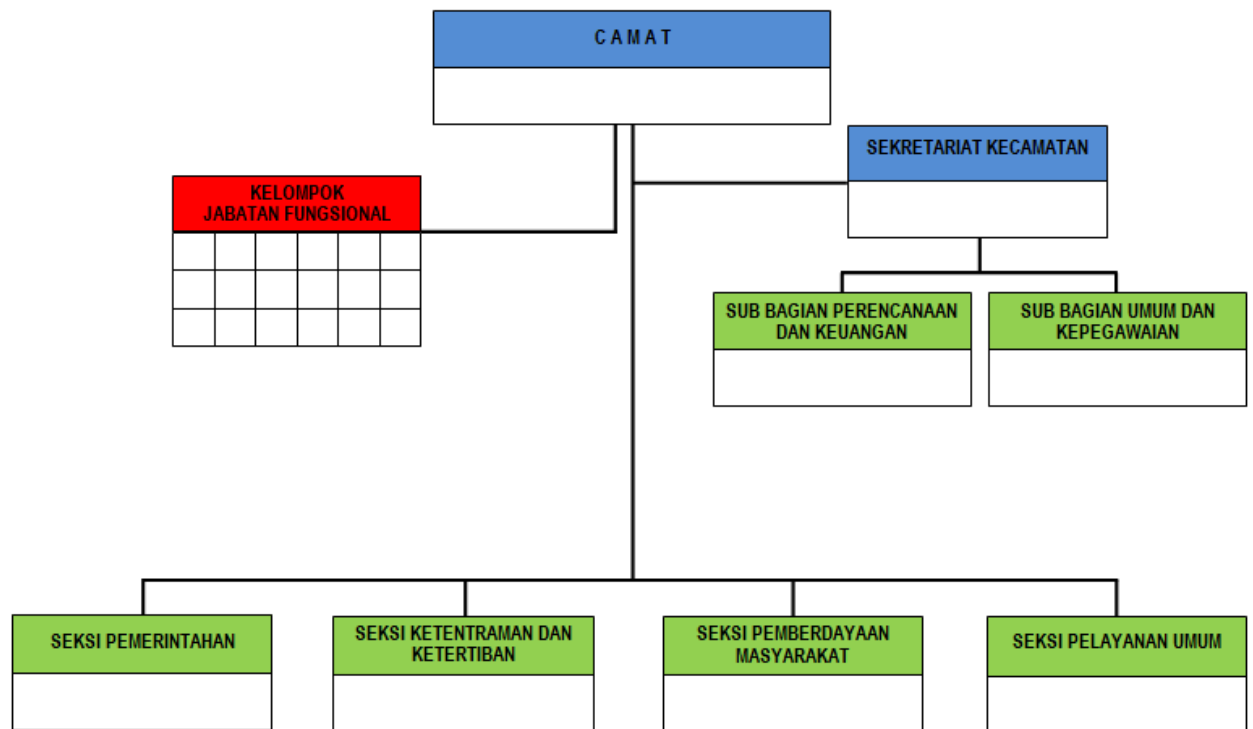
Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			garansi/masa purna jual barang dibandingkan dengan spesifikasi barang dalam kontrak dan memfoto barang serta menempelkan label barang pemeriksaan
			Barang yang telah diterima oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang selanjutnya diserahkan kepada subbag umpeg
			Membuat dan menandatangani BA Kemajuan dan Pemeriksaan Barang
	05.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	05.6.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Merekap kebutuhan pembayaran belanja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		05.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Membayar belanja jasa dan menghimpun nota-nota pembayarannya
		05.6.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Membuat laporan belanja jasa dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
		05.6.4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditanda tangani pengguna anggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda
	05.7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	05.7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Merekap kebutuhan pembayaran belanja pemeliharaan
		05.7.2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Membayar belanja pemeliharaan dan menghimpun nota-nota pembayarannya
			Membuat laporan belanja pemeliharaan dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
			Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditanda tangani pengguna anggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------



c. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kaliwungu
Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016



C. Isu-isu Strategis

Isu strategis pada Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik yang belum optimal menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan OPD di Kecamatan bagian dari meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat.

2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Belum optimalnya penanganan bencana hal ini dilihat dari masih kurangnya

penanganan kebencanaan karena struktur geografis wilayah Kecamatan Kaliwungu yang berada di wilayah dataran tinggi yang rawan longsor dan tingginya curah hujan.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal dilihat dari minimnya sarana dan prasarana pemerintah desa, pengelolaan asset desa belum optimal dan peran kelembagaan masyarakat belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Perencanaan pembangunan desa yang belum optimal perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang perlu melibatkan perempuan dan organisasi/Lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang reponsif gender.

D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

a. Sumber Daya Aparatur (SDM)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, terdiri dari 1 orang Camat (Eselon III.A), 1 orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III.B), 4 orang Kasi (Eselon IV.A), 2 orang Kasubag (Eselon IV.B) di tambah staf (jabatan fungsional umum).

Adapun data sumber daya aparatur Kecamatan Kaliwungu keadaan sampai dengan semester II Tahun 2025 sejumlah 14 orang, yang secara selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :		Jumlah outshorshing : 1 org SLTA
	- SD	- orang	
	- S M P	1 orang	
	- S L T A	2 orang	PPPK : 6 Orang, 3 Paruh Waktu
	- D II/III	- orang	PPPK : 3 Orang
	- S 1 / D 4	9 orang	PPPK : 6 Orang
	- S 2	1 orang	
2.	Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan :		
	- Golongan I	- orang	
	- Golongan II	2 orang	PPPK : 10 Orang, 3 Paruh waktu
	- Golongan III	10 orang	PPPK : 6 Orang
	- Golongan IV	1 orang	
3.	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan:		
	- Eselon II	-	
	- Eselon III	1 orang	
	- Eselon IV	5 orang	

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliwungu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Kaliwungu adalah :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kaliwungu

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
I.	Prasarana		
1.	Tanah Kantor	1 bidang	Mencukupi
2.	Gedung Sekretariat, ruang kerja Camat dan ruang pelayanan umum,	1 unit	Kurang
3.	Ruang Pertemuan (Aula)	1 unit	Layak

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
4.	Rumah Dinas Camat	1 unit	Tidak Layak
II.	Sarana		
	Kendaraan Dinas		
1.	Station Wagon / Toyota Kijang	1 unit	Tidak Layak
2	Station Wagon / Toyota New Avanza	1 unit	Mencukupi
2.	Sepeda Motor	14 unit	mencukupi (kondisi baik)
	Peralatan Kantor		
1.	Genset	1 unit	Mencukupi
2.	Lemari besi /metal	13 unit	Mencukupi
3.	Rak besi/metal	13 unit	Mencukupi
4.	Filling Cabinet	12 unit	Mencukupi
5.	Tiang PJU	1 unit	Mencukupi
6.	Lemari Kayu	5 unit	Mencukupi
7.	Pompa Air	2 unit	Mencukupi
8.	Lemari kayu	3 unit	Mencukupi
9.	Meja kursi tamu	3 unit	Mencukupi
10.	Tempat tidur kayu	1 unit	Mencukupi
11.	Tempat Tidur lipat	1 unit	Mencukupi
12.	Meja rapat	4 unit	Mencukupi
13.	Meja Tulis	5 unit	Mencukupi
14.	Meja panjang	2	Mencukupi
15.	Meja resepsionis	3 set	Mencukupi
16.	Kursi putar	10 unit	Mencukupi
17.	Kursi rapat	5 unit	Mencukupi
18.	Bangku tunggu besi	6unit	Mencukupi
19	Bangku tunggu kayu	8 unit	Mencukupi
19.	Meja komputer	2 unit	Mencukupi
20.	Kasur Springbed	1 unit	Mencukupi
21.	LCD Proyektor	2 unit	Mencukupi
22.	Mesin potong rumput	1 unit	Mencukupi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
23.	Lemari Es	2 unit	Mencukupi
24.	AC Split	9 unit	Kurang Mencukupi (5 unit baik)
25.	Kipas angin	2 unit	Mencukupi
26.	Meja 12 biro	26 unit	Mencukupi
27.	Kompore Gas	1 unit	Mencukupi
28.	Tabung gas	1 unit	Kurang
29.	Alat pemanas/dispenser	2 unit	Mencukupi
30.	Kursi kerja	37 unit	Mencukupi
31.	Kursi Lipat	60 unit	Mencukupi
32.	Televisi	6 unit	Mencukupi
33.	TOA	1 unit	Mencukupi
34.	Sound System	2 unit	Mencukupi
35.	Wireless Amplifier	1 unit	Mencukupi
36.	Tangkai Mic	1 unit	Mencukupi
37.	Podium	1 unit	Mencukupi
38.	Komputer	5 unit	Mencukupi
39.	Lap Top	10 unit	Mencukupi
40.	Printer	10 unit	Mencukupi
41.	Meja kerja pejabat eselon 3	2 unit	Mencukupi
42.	Pesawat Telepon	1 unit	Mencukupi
43.	Mesin penghisap debu	1 unit	Mencukupi
44.	Tandon Air	2 unit	Mencukupi
45.	Kamera	1 unit	Mencukupi
47.	Monitor Acer	2 unit	Mencukupi

c. Sumber Dana / Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan tugas pokok dan fungsi Camat di Kecamatan Kaliwungu mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 3.556.815.644,-

Dana tersebut antara lain digunakan untuk :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah Rp. 3.223.807.644,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sejumlah Rp. 32.740.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sejumlah Rp. 73.628.000,-.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sejumlah Rp. 95.740.000,-
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 55.400.000,-.
6. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sejumlah Rp. 64.500.000,-

Adapun yang sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas kepada masyarakat maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab yang kesemuanya dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK).

E. Sistematika Penulisan

Selanjutnya menindaklanjuti Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) , maka sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya. Kantor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sampai dengan bulan Desember 2025 dengan Sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSKUTIF

BAB I

: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur

Organisasi

C. Isu-isu Strategis

D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

E. Sistematika Penulisan

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Tahun 2023

BAB II

: PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

B. Strategi dan Arah Kebijakan

C. Perjanjianan Kinerja

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Efisiensi Anggaran.

C. Inovasi

D. Penghargaan

BAB IV

: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 000.8.6.3/ 321 ./Insp. Tanggal 8 Oktober 2025, tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Kaliwungu tahun 2025.

Tabel 1.4.Tindak lanjut LHE Tahun 2025

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menyusun Rencana Atas Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tahun	Keterangan
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkata Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu;	Sudah Kami tindak Lanjuti untuk Tahun 2025, dan untuk Acuan Perbaikan AKIP Tahun 2026.	2025	https://bit.ly/4axqGTn
2	Target yang di tetapkan dalam Perencanaan Kinerja agar memperhatikan tren capaian tahun sebelumnya, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan memastikan penetapan kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya di bandingkan target tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan dapat menggambarkan peningkatan kinerja;	Sudah Kami Tindaklanjuti, Bukti Terlampir	2025	https://bit.ly/4aP6vz4
3	Melaksanakan pengawasan, pemantauan atau pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala atas capaian kinerja sesuai tahapan target yang telah di tetapkan dengan	Sudah Kami Tindaklanjuti Sesuai Dengan Rencana Aksi Tahun 2025.	2025	https://bit.ly/4carfnp

	memuat capaian indikator kinerja secara lengkap beserta hambatan dan rencana perbaikannya yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja selanjutnya guna penyesuaian strategi/ kebijakan/ aktivitas dalam mencapai kinerja dan dalam penyusunan laporan kinerja.			
4	Dalam menyusun laporan Kinerja agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.	Sudah Kami Sesuaikan Dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dan Akan kami Jadikan Acuan di Tahun 2025	2025	https://bit.ly/4rZQ8Xw
5	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan capaian indikator sasaran dan capaian indikator program dengan selaras termasuk dengan analisisnya yaitu berupa informasi kualitas atas capaian kinerja beserta	Sudah Kami tindak Lanjuti dengan mengadakan Rapat internal Setiap Triwulan, Terlampir.	2025	https://bit.ly/46n0yYQ

	hambatan dan upaya nyatanya. Untuk selanjutnya mendorong pemanfaatan laporan kinerja., sehingga dapat memberikan saran/masukan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja selanjutnya;			
6	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun sebelumnya secara tuntas sesuai rencana aksi yang di susun dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 di tindaklanjuti dengan menyusun dan mel;aksanakan rencana aksi yang di sertai dengan data dukung hasil pelaksanaan sehingga dapat di manfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.	Sudah Kami Tindaklanjuti Sesuai Dengan Rencana Aksi Tahun 2025.		https://bit.ly/4bnTC0i

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kaliwungu

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026 adalah Kendal Handal, Unggul, makmur dan berkeadilan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

a. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

b. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

c. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

d. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan tujuannya serta hasil yang akan diperoleh dimasa datang.

Misi Kecamatan Kaliwungu adalah merupakan bagian dari misi Kabupaten Kendal, adapun misi untuk Kecamatan Kaliwungu mengambil Misi ke-5 adalah sebagai berikut:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai. **Tujuan** yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Kaliwungu adalah : **Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan.**

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan **sasaran** yang hendak dicapai Kecamatan Kaliwungu dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja :
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (IKM).
 2. Nilai SAKIP
- b. Meningkatnya Pembangunan Desa / Kelurahan
Indikator Kinerja : Jumlah desa yang naik statusnya.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan.	1	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (IKM). 2. Nilai SAKIP	97,93 73,85	97,94 73,90	97,95 73,95	97,96 74,00	97,98 74,05

Gambar 1.1

Cascading Kinerja Kecamatan Kaliwungu

Cascading Kecamatan Kaliwungu

Visi :
KENDAL HANDEL Unggul, Makmur, Berkeadilan

Misi :

- Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya tang dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
- Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dijunjung dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

TUJUAN SKPD

TUJUAN SKPD							SASARAN								
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik							Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								
Indikator Kinerja	Satuan	TARGET					Indikator Sasaran	Satuan	TARGET						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai IM Daerah	Nilai	87,17	87,37	87,77	88,17	88,47	88,77	Nilai SAMP Kecamatan	Nilai	70	71	73	75	77	80
								Nilai IM Kecamatan	Nilai	95	96	96	96	96	96

PROGRAM 1 (Ekslot IV) - Program Peningkatan Umpan Pemantauan Daerah											
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET							
				Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja		Persentase ketercapaian pengumpan umpan perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100

KEGIATAN - Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekslot IV) - Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET							
				Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	
Jumlah Perencanaan Dokumen yang disusun		Jumlah laporan capaian kinerja dan anggaran yang disusun		Laporan	12	12	0	0	0	0	
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan daerah perangkat daerah		Laporan	0	0	12	12	12	12	
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekslot IV) - Evaluasi kinerja perangkat daerah											
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET							
				Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD		Bulan	12	12	0	0	0	0	
Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		Laporan	0	0	12	12	12	12	
KEGIATAN - Administrasi keuangan perangkat daerah											
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekslot IV) - Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN											
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET							
				Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	
Terlaksananya gaji dan tunjangan ASN		Jumlah kelengkapan gaji dan tunjangan PNS		Bulan	17	17	0	0	0	0	
Terlaksananya gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Orang/ bulan	0	0	17	17	17	17	
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekslot IV) - Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET							
				Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	
Terlaksananya honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan Pengadaan barang dan jasa		Jumlah bulat honorarium pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa		Bulan	0	12	0	0	0	0	
Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Dokumen	0	0	12	12	12	12	
KEGIATAN - Administrasi keuangan perangkat daerah											
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekslot IV) - Pengadaan pakuan dinas beserta perlengkapannya											
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET							
				Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	
Terlaksananya disiplin anggaran		Jumlah pakuan dinas dan		Bulan	17	17	0	0	0	0	
Terlaksananya pakuan dinas beserta perlengkapannya		Jumlah paket pakuan dinas beserta perlengkapannya		Paket	0	0	17	17	17	17	

KEGIATAN - Administrasi umum perangkat daerah										
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekslot IV) - Pemeliharaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET						
				Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6
Terlaksananya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Bulan	0	0	0	0	0	0
Terlaksananya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket	0	0	57	60	65	65
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekslot IV) - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET						
				Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6
Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah bulat kebutuhan alat tulis kantor		Bulan	12	12	0	0	0	0
Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Paket	0	0	12	12	12	12
Nama Sub Kegiatan 3 (Ekslot IV) - Penyediaan peralatan Rumah Tangga										

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Jumlah jenis Barang Peralatan Rumah Tangga yang di Serahkan	Jumlah jenis Barang Peralatan Rumah Tangga yang di Serahkan	Saluran
Terlaksananya Perawatan Rumah Tangga	Perawatan Perawatan Rumah Tangga	Saluran
Nama Sub Kegiatan 3 (Ekskusi IV) - Pemeliharaan bahan logistik kantor		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Jumlah Bulan Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman untuk rapid di, jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai/ASN	Saluran
Terlaksananya bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Saluran
Nama Sub Kegiatan 4 (Ekskusi IV) - Pemeliharaan barang cetakan dan pengagungan		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya barang cetakan dan pengagungan	Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan pengagungan	Saluran
Terlaksananya barang cetakan dan pengagungan	Jumlah paket barang cetakan dan pengagungan yang disediakan	Saluran
Nama Sub Kegiatan 5 (Ekskusi IV) - Pemeliharaan bahan busan dan peralatan perundang-undangan		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya bahan busan dan peralatan perundang-undangan	Jumlah bulan kebutuhan Bahan busan dan peralatan perundang-undangan	Saluran
Terlaksananya bahan busan dan peralatan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan busan dan peralatan perundang-undangan yang disediakan	Saluran
Nama Sub Kegiatan 6 (Ekskusi IV) - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan/kuarter pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi	Saluran
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Saluran
KEGIATAN - Pengadaan barang untuk daerah perundang-undangan pemerintah daerah		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Jumlah jenis Barang Mebel yang Tersedianya Mebel	Jumlah jenis Mebel yang tersedia	Saluran
Terlaksananya Mebel	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	Saluran
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekskusi IV) - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya aset kantor yang tersedia	Jumlah aset kantor yang tersedia	Saluran
Terlaksananya unit peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Saluran
KEGIATAN - Penyelenggaraan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya pengadaan material	Jumlah bulan/kuarter pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi	Saluran
Terlaksananya penyelenggaraan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyelenggaraan jasa surat menyurat	Saluran
Nama Sub Kegiatan 3 (Ekskusi IV) - Penyelenggaraan jasa komunikasi, sumber daya air dan energi		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan energi yang disediakan	Jumlah laporan penyelenggaraan jasa komunikasi, sumber daya air dan energi yang disediakan	Saluran
Nama Sub Kegiatan 4 (Ekskusi IV) - Penyelenggaraan jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah laporan penyelenggaraan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Saluran
Nama Sub Kegiatan 5 (Ekskusi IV) - Penyelenggaraan jasa Pelayanan Umum Kantor		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyelenggaraan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Saluran
KEGIATAN - Pemeliharaan barang untuk daerah perundang-undangan pemerintah daerah		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya pemeliharaan, sewa pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan perundang-undangan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Saluran

PROGRAM 4 (Ekskusi III) - Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan umum	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengisian keabsahan dan ketertarikan yang ditangan	Saluran
PROGRAM 5 (Ekskusi III) - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase persentase KIRSDI tepat waktu	Saluran
PROGRAM 6 (Ekskusi III) - Program Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase persentase KIRSDI tepat waktu	Saluran

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya kegiatan TP PKSD	Jumlah bulan kegiatan TP PKSD dan kegiatan pembinaan serta pelaksanaan pembinaan kepada pemuda	Saluran
Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Saluran
KEGIATAN - Koordinasi Ujup Penyelenggaraan pemerintahan dan ketertarikan umum		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya akreditasi keamanan dan ketertarikan di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Saluran
Terlaksananya kegiatan dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Saluran
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekskusi IV) - Koordinasi/lini dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pengangkatan peraturan perundang-undangan dan/atau kegiatan negara Republik Indonesia		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya laporan koordinasi dan jumlah bulan pembayaran upah atau honor	Jumlah laporan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pengangkatan peraturan perundang-undangan dan/atau kegiatan negara Republik Indonesia	Saluran
Terlaksananya koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pengangkatan peraturan perundang-undangan dan/atau kegiatan negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pengangkatan peraturan perundang-undangan dan/atau kegiatan negara Republik Indonesia	Saluran
KEGIATAN - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Desa Pemungutan Pajak Daerah		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Jumlah Pembiayaan Umum Desa	Jumlah Pembiayaan Umum Desa yang di laksanakan	Saluran
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembiayaan (Bimtek, Sosialisasi, Komunitas) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah laporan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Saluran
KEGIATAN - Fasilitas Ketahanan dan ketahanan pembiayaan dan pengawasan pemerintahan desa		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya fasilitas tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desa	Saluran
Terlaksananya fasilitas tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Saluran
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekskusi IV) - Fasilitas pengalihan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET
Terlaksananya fasilitas keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa	Saluran
Terlaksananya fasilitas keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengalihan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Saluran

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terlaksana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas berenergi/elektronik	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas berenergi/elektronik	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas berenergi/elektronik	Sesuai	Ths 1	Ths 2	Ths 3	Ths 4	Ths 5	Ths 6
				12	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
		Nama Kegiatan 2 (Ekselon IV) : Perbaikan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan pertanahan kendaraan dinas operasional atau lapangan							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terlaksana pemeliharaan kendaraan dinas operasional, terbayanya STNK kendaraan dinas operasional dan jumlah Pemeliharaan/berkala berenergi/elektronik gedung kantor	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional, terbayanya STNK kendaraan dinas operasional dan jumlah Pemeliharaan/berkala berenergi/elektronik gedung kantor	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional, terbayanya STNK kendaraan dinas operasional dan jumlah Pemeliharaan/berkala berenergi/elektronik gedung kantor	Sesuai	Ths 1	Ths 2	Ths 3	Ths 4	Ths 5	Ths 6
				12	12	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
		Nama Sub Kegiatan 3 (Ekselon IV) : Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terlaksana pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Sesuai	Ths 1	Ths 2	Ths 3	Ths 4	Ths 5	Ths 6
				1	1	0	0	0	0
				0	0	0	16	16	16
		Nama Sub Kegiatan 4 (Ekselon IV) : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terlaksana pemeliharaan/berkala berenergi/elektronik gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/berkala berenergi/elektronik gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/berkala berenergi/elektronik gedung kantor	Sesuai	Ths 1	Ths 2	Ths 3	Ths 4	Ths 5	Ths 6
				1	1	0	0	0	0
				0	0	0	1	1	1
		Nama Sub Kegiatan 5 (Ekselon IV) : Pemeliharaan/berkala sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terlaksana pemeliharaan/berkala berenergi/elektronik sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/berkala berenergi/elektronik sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/berkala berenergi/elektronik sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sesuai	Ths 1	Ths 2	Ths 3	Ths 4	Ths 5	Ths 6
				1	1	0	0	0	0
				0	0	0	1	1	1
		KEGIATAN - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdapat di pada rangkai							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terlaksana sosialisasi tentang PATEN	Jumlah sosialisasi tentang PATEN	Kali	1	1	0	0	0	0	0
				0	0	1	1	1	1
				Nama Sub Kegiatan 2 (Ekselon IV) : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana urusan pemerintahan yang terdapat di pada rangkai	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdapat di pada rangkai	Laporan	0	0	0	1	1	1	1
				0	0	0	0	0	0
				KEGIATAN - Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Jumlah Kewenangan lain yang di dapatkan	Jumlah sosialisasi tentang PATEN	Kali	1	1	0	0	0	0	0
				0	0	1	1	1	1
				Nama Sub Kegiatan 3 (Ekselon IV) : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	0	0	0	0
				0	0	5	5	5	5
				Nama Sub Kegiatan 4 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 5 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 6 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 7 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 8 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 9 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 10 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 11 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 12 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 13 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 14 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 15 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 16 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 17 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 18 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 19 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 20 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 21 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 22 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 23 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 24 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 25 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 26 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 27 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 28 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 29 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 30 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 31 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 32 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 33 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 34 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 35 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 36 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 37 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				Nama Sub Kegiatan 38 (Ekselon IV) : Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di pada rangkai					
		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Terlaksana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kegiatan							

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.

Misi RPJMD yang terkait:

MISI KE 5 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Tahun 2026

NO	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan.	1.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	Skor	97,94
			2. Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Skor	73,90

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan SIPDRI	Meningkatkan kinerja Kecamatan dengan kualitas fokus kualitas perencanaan, penganggaran,

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIM ASET	pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan asset Kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renja, RKA/DPA OPD yang terukur	
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, meningkatkan peran desa dalam pembangunan
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan	
	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP	
	Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes, Perkades, dan Aset Desa	
	Meningkatkan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/UPTD dan Desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan	
	Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan	

C. Perjanjian Kinerja

Kecamatan Kaliwungu telah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2026 yang telah ditandatangani Camat Kaliwungu dan Bupati Kendal sebagai suatu Dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kaliwungu. Perjanjian Kinerja tersebut mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Kaliwungu beserta target kinerja tahun 2026.

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Camat Kaliwungu Tahun 2026

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	Skor	97,94
		Nilai SAKIP	Skor	73,90

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2026

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persen	100
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	Persen	100
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100
1.3	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	Persen	100
1.4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan barang milik daerah	Unit	4
1.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	Bulan	12
1.6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	Unit	19
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Persen	100
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Kegiatan	1
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Persen	30
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa	Kali	12
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Persen	100
4.1	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang ditangani	Persen	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegitan	1

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang tertib administrasi	Persen	100
6.1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	kali	13

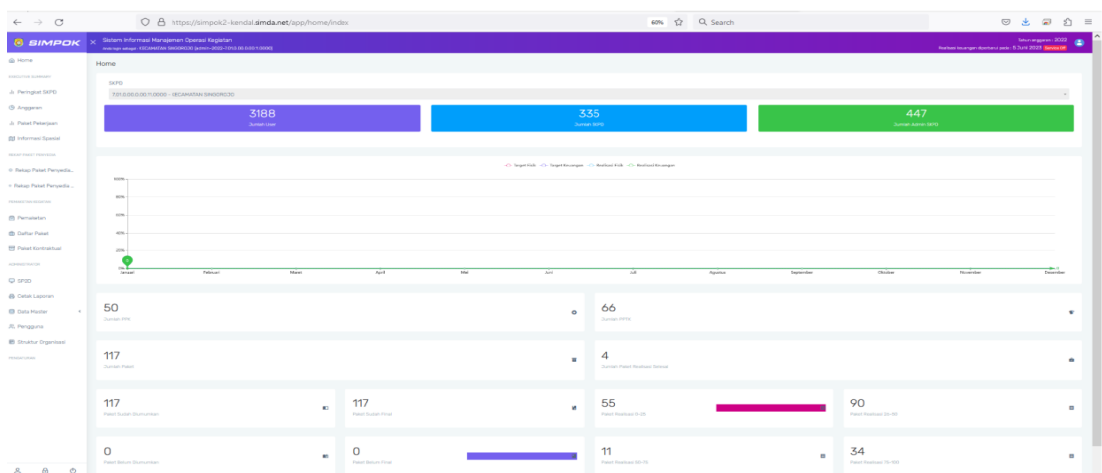
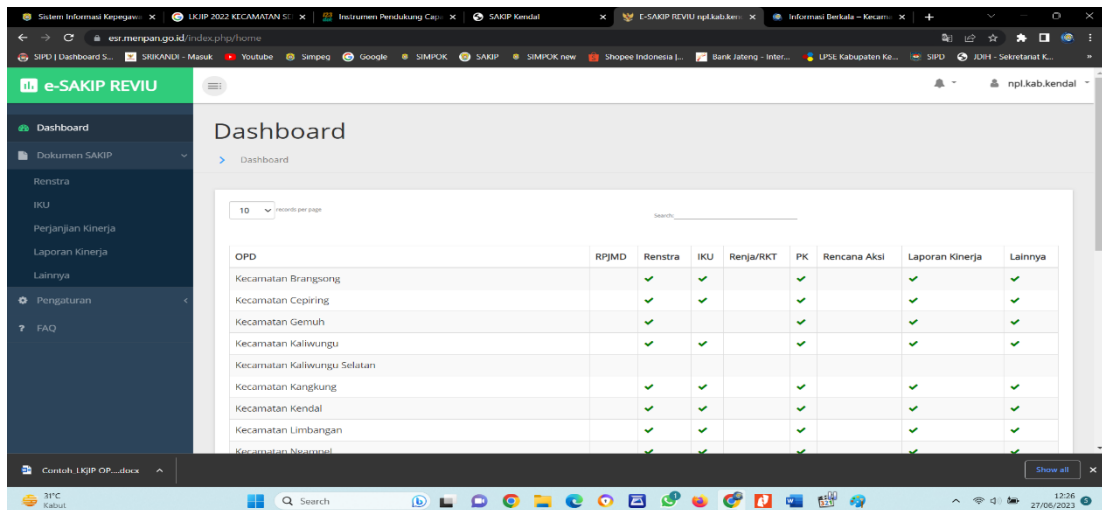
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

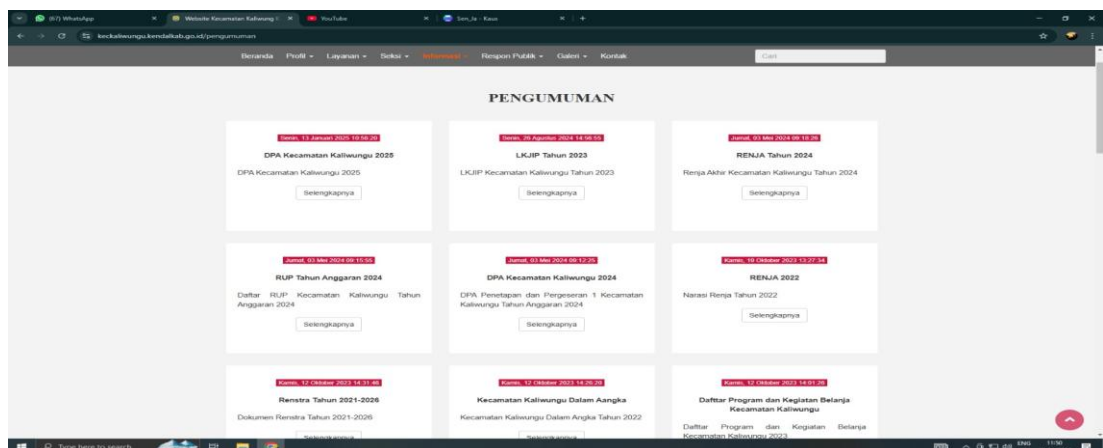
- a. <https://sakip-kendal.simda.net/>, <https://simpok.kendalkab.go.id/> dan <https://esr.menpan.go.id/>

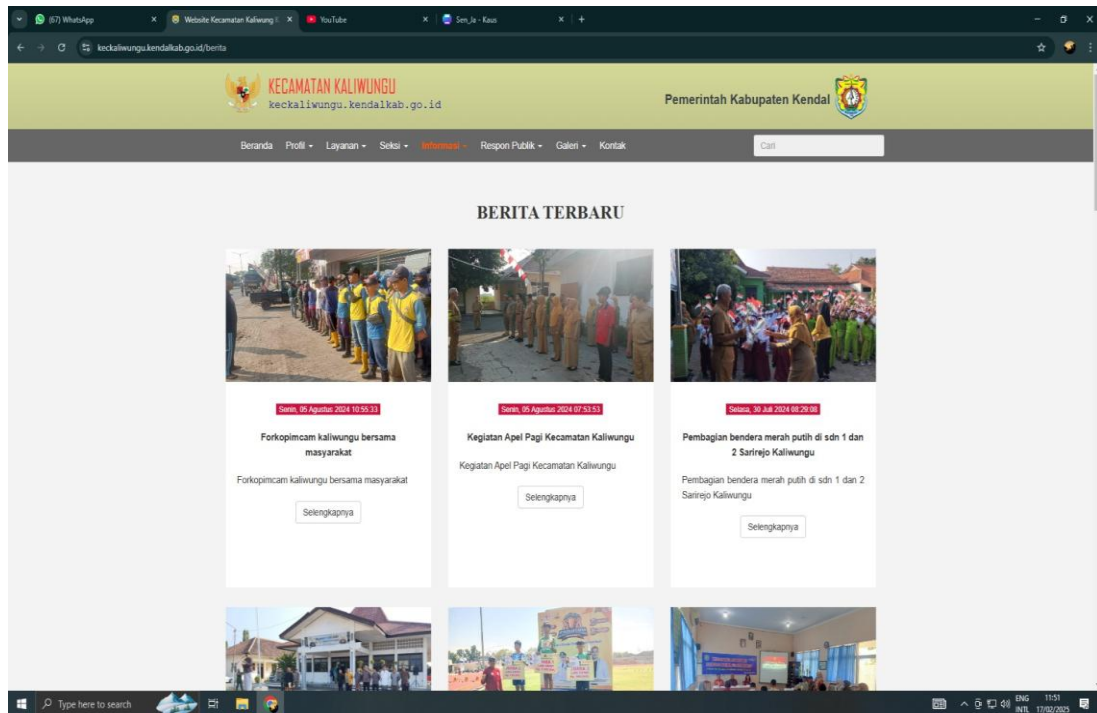
Yang mengintegrasikan perencanaan, anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OP.

Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	Total Bobot
PERENCANAAN KINERJA	0.00	0.00	0.00	30.00
PENGUKURAN KINERJA	0.00	0.00	0.00	30.00
PELAPORAN KINERJA	0.00	0.00	0.00	15.00
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	0.00	0.00	0.00	25.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	0.00	0.00	0.00	100.00



- b. Website Kecamatan Kaliwungu <https://kecKaliwungu.kendalkab.go.id/> adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis pencapaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Kecamatan Kaliwungu. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja *performance gap* karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Skala Nilai Peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : >100%
- b. Baik : 85 – 100 %
- c. Cukup : 65 – 84%
- d. Kurang : 50 – 64,99%
- e. Sangat Kurang : <50%

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai IKM	Skor	96	97,92	102	96
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	Skor	77	73,95	98,33 3	75

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2025 dengan nilai kurang dari 100 % dengan peringkat **baik**.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2021 Kecamatan Kaliwungu telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 6 program dan 11 kegiatan. Semua kegiatan merupakan proyek yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2025 dan merupakan komitmen Kecamatan Kaliwungu dalam mengimplementasikan rencana strategis 2021-2025.

Adapun kegiatan-kegiatan yang merupakan perencanaan dari tahun 2025 yang turut diperhitungkan dalam upaya pencapaian sasaran, sehingga dapat diketahui perbandingan antara target dan realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

Misi Kedua : dijabarkan pada beberapa kegiatan di kantor Kecamatan adalah mendasarkan Misi-5 Kabupaten Kendal yaitu

Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif Reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif

Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran renstra tahun 2021-2026. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.2
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai IKM	96	97,92	102 %	Sangat Baik	Laporan IKM
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	75	73,75	98,333	Baik	Hasil Penilaian SAKIP

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2025 telah berhasil dicapai yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai IKM dari target 96 realisasi 97,92 capaian kinerja 102, dengan kategori ***Sangat Baik***.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai SAKIP dari target 75 realisasi 73,75 capaian kinerja 98,333% dengan kategori ***Baik***.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yaitu dalam 3 tahun terakhir tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Targ et	Realis asi	%	Targ et	Rea lisa si	%	Ta rg et	Rea lisa si	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkat nya Nilai IKM	96	97,79	101 ,86	96	97, 92	101 ,86 4	96	97,9 2	1,02
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkat nya Nilai SAKIP	73	73,60	100 ,29	73	73, 75	100 ,82	75	73,9 5	98,6 0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja Kecamatan Kaliwungu untuk indikator indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan mengalami kenaikan , demikian juga dengan capaian nilai akuntabilitas kinerja (Sakip), menunjukan tren naik setiap periodenya. Artinya Kecamatan Kaliwungu dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukan kinerja sangat tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.

Perbandingan capaian kinerja akhir tahun 2025 dengan capaian awal Renstra tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan capaian Kinerja dengan Target Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	95.55	97,92	102,48 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Kecamatan	70,03	73,95	105,59 %

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkat Nya Nilai IKM	96	96,76	102,48	Peningkatan pelayanan masyarakat baik dalam sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia	Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dan petugas melayani dengan ramah sesuai SOP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkat nya Nilai SAKIP	73.85	73,95	98,33	Instrumen penilaian SAKIP yang harus dipenuhi banyak dan harus tepat waktu	Memenuhi semua instrumen penilaian SAKIP dan dibuat/diupload tepat waktu

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kaliwungu seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	96	96,76	102,48	3.223.807.644	2.506.363.678	77,77	93,41 (efisien)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	73,85	73,95	100,13	333.008.000	291.239.960	87,45	87,81 (efisien)

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Program/Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkat Nya Nilai IKM	102,48	Program penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 kegiatan	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	30,76	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Desa)	9 desa	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 %	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (Kali)	12 kali	Menunjang

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang ditangani	100 %	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan (kali)	12 kali	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase jumlah desa yang tertib administrasi	100 %	Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes (Persen)	100 %	Menunjang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	100,13	Program Penunjang urusan pemerintahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD (Persen)	100 %	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)	100 %	Menunjang

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor (Persen)	100 %	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah (Unit)	4 unit	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor (Bulan)	12 bulan	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah (Unit)	19 unit	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Kaliwungu sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.556.815.644 dan realisasi sebesar Rp. 2.797.6003.638 atau 78,65 %.Capaian Program dan Kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang urusan pemerintahan	3.223.807.644	2.506.363.678	77,75
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	252.000	25,20
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.769.514.116	2.206.268.557	79,66
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	223.014.788	125.018.713	56,06

	Daerah			
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.000	0	0
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.636.940	149.681.408	85,71
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.615.800	25.143.000	45,21
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	32.740.000	30.704.000	93,78
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	32.740.000	30.704.000	93,78
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	73.628.000	62.200.000	84,48
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.628.000	62.200.000	84,48
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	95.740.000	89.090.960	93,06
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	95.740.000	89.090.960	93,06
5	Program Penyelenggaraan	66.400.000	55.845.000	84,10

	Urusan Pemerintahan Umum			
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.400.000	55.845.000	84,10
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64.500.000	53.400.000	82,79
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64.500.000	53.400.000	82,79

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 Kegiatan. Target kinerja yang tercapai adalah 6 Kegiatan. Dengan anggaran Rp. 3.223.807.644. Realisasi sebesar Rp. 2.506.363.678. Persentase yang tercapai 77.75 % dan target kinerja yang tidak tercapai yaitu 1 hal ini disebabkan oleh Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja. Kendala utama yang dihadapi adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 yang mengakibatkan penyesuaian alokasi belanja pada beberapa kegiatan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal perangkat daerah sehingga tidak seluruh rencana dukungan operasional dapat direalisasikan secara maksimal. Selain itu, penentuan prioritas anggaran yang difokuskan pada kebutuhan yang lebih mendesak menyebabkan terdapat indikator kinerja yang belum dapat terpenuhi sepenuhnya.

Sebagai langkah perbaikan, perangkat daerah telah dan akan melakukan penajaman prioritas program dan kegiatan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Optimalisasi efisiensi belanja operasional juga terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas output kegiatan. Di samping itu, perencanaan

anggaran ke depan akan disusun lebih adaptif melalui penetapan skala prioritas sejak tahap perencanaan serta diperkuat dengan monitoring dan evaluasi secara berkala. Perangkat daerah juga mengupayakan alternatif sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan serta melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan yang belum optimal agar dapat diakomodasi pada periode berikutnya.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari 1 Kegiatan. Dengan anggran Rp. 32.740.000 Realisasi sebesar Rp. 30.704.000, Persentase yang tercapai 79,66 %, Target kinerja yang tercapai adalah 1 Kegiatan Tercapai Semuanya.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan seluruh target kinerja kegiatan dapat tercapai. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi belanja serta penyesuaian kebutuhan riil di lapangan sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang secara hemat dan efektif juga berpengaruh terhadap lebih rendahnya realisasi dibandingkan pagu yang tersedia.

Sebagai upaya perbaikan, perangkat daerah akan terus meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Optimalisasi monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran juga akan diperkuat guna mengantisipasi terjadinya deviasi sejak dini. Di samping itu, efisiensi belanja tetap dipertahankan dengan memastikan kualitas output kegiatan tidak menurun, sehingga pada tahun berikutnya diharapkan tingkat serapan anggaran dapat lebih optimal dan tetap selaras dengan pencapaian kinerja.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 1 Kegiatan. Dengan anggran Rp. 73.628.000. Realisasi sebesar Rp. 62.200.000, Persentase yang tercapai 84,48%. Target kinerja yang tercapai adalah 1 Kegiatan Tercapai Semuanya.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan secara kinerja telah mencapai target, namun dari sisi penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi pada beberapa komponen belanja serta penyesuaian kebutuhan riil di lapangan yang mengakibatkan sebagian anggaran tidak digunakan. Selain itu, keterbatasan

waktu pelaksanaan dan perencanaan yang belum sepenuhnya presisi dengan kondisi aktual turut mempengaruhi tingkat realisasi anggaran.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih berbasis data dan kebutuhan riil, disertai penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan agar jadwal lebih efektif. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu ditingkatkan untuk memastikan progres fisik dan keuangan berjalan selaras. Dengan langkah tersebut, diharapkan penyerapan anggaran pada pelaksanaan program berikutnya dapat lebih optimal tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.

Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum yang terdiri dari 1 Kegiatan. Dengan Anggran Rp. 95.740.000, Realisasi Sebesar Rp. 89.090.960, Persentase yang tercapai 93,06% Target kinerja yang tercapai adalah 1 Kegiatan Tercapai Semuanya. Meskipun capaian kinerja telah terpenuhi, penyerapan anggaran belum maksimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi belanja pada beberapa komponen kegiatan, penyesuaian kebutuhan operasional di lapangan, serta penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penguatan koordinasi pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi secara berkala perlu terus ditingkatkan guna memastikan keselarasan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan program berikutnya dapat lebih optimal baik dari sisi output maupun realisasi keuangan.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 1 Kegiatan. Dengan Anggran Rp. 66.400.000, Realisasi Sebesar Rp. 55.845.000, Persentase yang tercapai 84,10%, Target kinerja yang tercapai adalah 1 Tercapai Semuanya. Walaupun output kegiatan telah tercapai seluruhnya, tingkat penyerapan anggaran masih belum maksimal. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh adanya rasionalisasi belanja, penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan aktual di lapangan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Untuk perbaikan pada periode berikutnya, perlu dilakukan penyelarasan perencanaan anggaran dengan kebutuhan operasional yang lebih akurat. Di samping itu, peningkatan pengendalian pelaksanaan melalui monitoring rutin dan

evaluasi berkala menjadi penting agar pemanfaatan anggaran dapat lebih efektif dan efisien. Dengan upaya tersebut, diharapkan keseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan dapat semakin baik.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 Kegiatan. Dengan Anggaran Rp. 64.500.000, Realisasi Sebesar Rp. 53.400.000, Persentase yang tercapai 82,79%, Target kinerja yang tercapai adalah 1 Kegiatan Tercapai Semuanya.

Meskipun seluruh target kegiatan telah tercapai, masih terdapat selisih anggaran yang tidak terserap secara penuh. Hal ini antara lain disebabkan oleh penyesuaian metode pembinaan di lapangan, optimalisasi penggunaan sarana yang telah tersedia, serta adanya efisiensi pada beberapa komponen belanja operasional.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pada periode mendatang, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran agar lebih proporsional dengan kebutuhan teknis pembinaan dan pengawasan. Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa serta penjadwalan kegiatan yang lebih sistematis dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal, tanpa mengurangi mutu hasil kegiatan.

C. INOVASI

Sesuai dengan kondisi pencapaian nilai pajak yang dalam ringking kabupaten tergolong masih rendah , Kecamatan Kaliwungu Inovasi 2025 Pak Camat Sapa PBB.

Pada Tahun 2024 sudah ada, Pada Tahun 2025, Kecamatan Kaliwungu telah melaksanakan inovasi “Pak Camat Sapa PBB” sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kegiatan ini diwujudkan melalui sambang langsung kepada pemerintah desa dan wajib pajak, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta monitoring dan evaluasi capaian PBB secara berkala. Dibandingkan Tahun 2024, realisasi penerimaan PBB pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan, dari 79,39% pada Tahun 2024 menjadi 82,10% pada Tahun 2025, yang sebelumnya relatif rendah akibat belum optimalnya monitoring dan sosialisasi ke desa. Pelaksanaan inovasi ini menjadi bukti komitmen

Kecamatan Kaliwungu dalam mendorong optimalisasi penerimaan PBB serta memperbaiki posisi capaian pajak di tingkat kabupaten.

D. PENGHARGAAN

Sampai dengan saat ini Kecamatan Kaliwungu belum mendapatkan penghargaan, semoga di tahun-tahun mendatang bisa mendapatkan penghargaan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2025 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaliwungu sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
2. Kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan dan keuangan masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Belum optimalnya pegawai yang menduduki jabatan Sub Bagian maupun Seksi dalam pelaksanaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

A. REKOMENDASI

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, komputer dan perlengkapannya.

2. Penempatan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya.
3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas.
4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2025 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dan belum dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Kaliwungu di masa mendatang.

Kaliwungu, Januari 2026



PRATIKTO JOKO WIJAYANTO, SH

PRATIKTO JOKO WIJAYANTO, SH

Pembina

NIP. 19721116200312002